

PENERAPAN PRINSIP AKRUAL DALAM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN PAJAK PADA PT BPRS KARYA MUGI SENTOSA

Anggy Dwi Puspitasari¹, M. Luthfillah Habibi²

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : anggydwe@gmail.com¹, ismiluthfi@gmail.com²

ABSTRAK

PT BPRS Karya Mugi Sentosa, sebagai institusi keuangan syariah, dihadapkan pada kompleksitas pengelolaan pajak yang berkaitan dengan berbagai jenis pajak serta juga penerapan prinsip akrual dalam akuntansi. Penerapan prinsip akrual ialah dasar penting dalam akuntansi yang mengharuskan pengakuan pendapatan serta juga beban pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Pengelolaan pajak yang efektif memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan serta penerapan prinsip akrual yang konsisten untuk memastikan kepatuhan serta juga efisiensi dalam manajemen pajak. Temuan ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta juga menganalisis penerapan prinsip akrual dalam akuntansi serta juga pengelolaan pajak di PT BPRS Karya Mugi Sentosa. Tujuan khusus dari temuan ini ialah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan prinsip akrual, menganalisis praktik perencanaan serta juga pelaporan pajak, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer keuangan, staf akuntansi, serta juga auditor internal, serta observasi langsung serta juga analisis dokumen perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis tematik, meliputi reduksi data, penyajian data, serta juga penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber serta juga metode untuk memastikan validitas serta juga reliabilitas temuan. Hasil temuan menunjukkan bahwasanya PT BPRS Karya Mugi Sentosa telah menerapkan prinsip akrual dengan baik dalam kebijakan akuntansinya, yang memungkinkan pengakuan pendapatan serta juga beban secara tepat waktu, sesuai dengan transaksi yang terjadi. Perusahaan juga mengelola kewajiban pajaknya dengan cermat melalui perencanaan pajak yang strategis serta juga pelaporan yang tepat waktu. Proses pelaporan pajak dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik, yang meningkatkan akurasi serta juga efisiensi. Meskipun perusahaan menghadapi tantangan dalam pengelolaan arus kas serta juga perbedaan antara pelaporan akuntansi serta juga pajak,

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

secara keseluruhan, PT BPRS Karya Mugi Sentosa menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan pajak serta juga pengelolaan keuangan yang efektif.

Kata Kunci : Prinsip Akrua; Pengelolaan Pajak; Praktik Akuntansi

ABSTRACT

PT BPRS Karya Mugi Sentosa, as a sharia financial institution, is faced with the complexity of tax management related to various types of taxes and the application of the accrual principle in accounting. The application of the accrual principle is an important basis in accounting which requires the recognition of income and expenses when transactions occur, not just when cash is received or paid. Effective tax management requires a deep understanding of tax regulations and consistent application of accrual principles to ensure compliance and efficiency in tax management. This research aims to explore and analyze the application of the accrual principle in accounting and tax management at PT BPRS Karya Mugi Sentosa. The specific objectives of this research are to identify the challenges faced by companies in implementing the accrual principle, analyze tax planning and reporting practices, and evaluate the effectiveness of tax management carried out by the company. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through in-depth interviews with financial managers, accounting staff and internal auditors, as well as direct observation and analysis of company documents. The data analysis technique used is thematic analysis, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions with triangulation of sources and methods to ensure the validity and reliability of the findings. The research results show that PT BPRS Karya Mugi Sentosa has implemented the accrual principle well in its accounting policies, which allows timely recognition of income and expenses, according to the transactions that occur. The Company also manages its tax obligations carefully through strategic tax planning and timely reporting. The tax reporting process is carried out using an electronic system, which increases accuracy and efficiency. Although the company faces challenges in cash flow management and differences between accounting and tax reporting, overall, PT BPRS Karya Mugi Sentosa shows a strong commitment to tax compliance and effective financial management.

Keywords : Accrual Principle; Tax Management; Accounting Practices

PENDAHULUAN

Prinsip akrual ialah salah satu pilar fundamental dalam akuntansi yang menjadi landasan bagi pelaporan keuangan yang relevan, akurat, serta juga andal. Prinsip ini menetapkan bahwasanya transaksi ekonomi serta juga peristiwa lainnya diakui serta juga dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (H. Hidayat & Wijaya, 2022). Dengan kata lain, prinsip akrual mengharuskan pencatatan pendapatan ketika diperoleh serta juga beban ketika terjadi, terlepas dari kapan pembayaran

aktual terjadi. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih realistis serta juga tepat waktu mengenai posisi keuangan, kinerja, serta juga arus kas perusahaan (Siswanto, 2020).

Prinsip akrual memiliki beberapa implikasi penting dalam penyusunan laporan keuangan. Pertama, dalam pendapatan, prinsip akrual menyatakan bahwasanya pendapatan harus diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut serta juga jumlahnya dapat diukur dengan andal. Hal ini berarti pendapatan tidak harus menunggu sampai kas diterima. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menjual barang kepada pelanggan dengan kredit, pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan, bukan pada saat pembayaran diterima. Dengan demikian, prinsip akrual memastikan bahwasanya pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi mencerminkan nilai ekonomi yang dihasilkan selama periode tersebut (Permatasari et al., 2024).

Dalam hal beban, prinsip akrual mengharuskan pencatatan beban pada saat kewajiban untuk membayar beban tersebut muncul, meskipun pembayaran aktualnya mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, jika sebuah perusahaan menerima jasa pada bulan tertentu tetapi pembayaran untuk jasa tersebut dilakukan di bulan berikutnya, beban terkait harus dicatat dalam laporan laba rugi bulan di mana jasa tersebut diterima, bukan bulan di mana pembayaran dilakukan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwasanya semua beban yang berkaitan dengan pendapatan yang diakui dalam suatu periode dilaporkan dalam periode yang sama, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih akurat (Widayani, 2023).

Penggunaan prinsip akrual juga memperkenalkan konsep *matching*, yang bertujuan untuk mencocokkan pendapatan dengan beban yang terkait dalam periode yang sama. Konsep ini penting untuk menghindari *overstatement* atau *understatement* dari laba bersih perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan mencocokkan pendapatan serta juga beban yang terkait, prinsip akrual membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasi intinya (Yulianingsih et al., 2023).

Selain itu, prinsip akrual memainkan peran penting dalam pelaporan posisi keuangan perusahaan. Neraca, yang ialah laporan keuangan utama yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada titik waktu tertentu, dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan prinsip akrual. Misalnya, piutang usaha, yang ialah jumlah yang terutang kepada perusahaan oleh pelanggannya, diakui dalam neraca meskipun kas belum diterima (Pratama, 2023). Demikian pula, kewajiban seperti utang usaha diakui pada saat kewajiban tersebut muncul, meskipun pembayaran kas belum dilakukan. Dengan cara ini, prinsip akrual memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai aset serta juga kewajiban perusahaan pada suatu saat tertentu (Afriyeni et al., 2024).

Namun, penerapan prinsip akrual juga menghadirkan tantangan. Salah satu tantangan utama ialah estimasi yang diperlukan dalam pengakuan pendapatan serta juga beban. Karena prinsip akrual sering kali mengharuskan pencatatan transaksi sebelum kas diterima atau dibayarkan, perusahaan sering kali harus membuat estimasi mengenai jumlah yang akan diterima atau dibayar di masa depan. Estimasi ini dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan, terutama jika terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai jumlah yang akan diterima atau dibayarkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan akuntansi yang jelas serta juga diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwasanya

estimasi ini dilakukan secara hati-hati serta juga berdasarkan informasi yang tersedia (Amrih, 2023).

Prinsip akrual tidak hanya relevan dalam akuntansi keuangan tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam pengelolaan pajak (E. Hidayat & Jaelani, 2024). Dalam sistem perpajakan berbasis akrual, pendapatan dikenakan pajak pada saat diperoleh, bukan pada saat kas diterima, serta juga beban dapat dikurangkan pada saat kewajiban untuk membayar beban tersebut muncul, bukan saat kas dibayarkan. Pendekatan ini memungkinkan otoritas pajak untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai laba kena pajak yang dihasilkan oleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu (Simanjuntak, 2021).

Di Indonesia, penerapan prinsip akrual dalam pengelolaan pajak diatur oleh Undang-Undang Perpajakan yang mensyaratkan wajib pajak badan untuk menggunakan metode akrual dalam menghitung pendapatan serta juga beban kena pajak. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan pengakuan pendapatan serta juga beban dalam laporan keuangan dengan penghitungan pajak, sehingga mengurangi potensi manipulasi pendapatan atau beban untuk tujuan menghindari pajak. Misalnya, dalam pengakuan pendapatan, prinsip akrual mencegah perusahaan menunda pengakuan pendapatan hingga kas diterima untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan dalam periode tersebut (Arizah et al., 2024).

Namun, penerapan prinsip akrual dalam perpajakan juga memunculkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama ialah perbedaan antara pelaporan keuangan serta juga perpajakan. Meskipun prinsip akrual digunakan baik dalam pelaporan keuangan maupun perpajakan, ada perbedaan tertentu dalam interpretasi serta juga penerapannya yang dapat menghasilkan perbedaan antara laba yang dilaporkan untuk tujuan keuangan serta juga laba kena pajak (Irawan & Djaddang, 2020). Sebagai contoh, beberapa beban mungkin dapat diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak diakui sebagai pengurang pajak, atau sebaliknya. Hal ini sering kali memerlukan rekonsiliasi antara laba akuntansi serta juga laba kena pajak yang dilaporkan (Astuti et al., 2024).

Selain itu, dalam praktiknya, beberapa perusahaan mungkin mencoba memanfaatkan celah dalam peraturan akuntansi atau perpajakan untuk menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan beban dengan tujuan mengurangi beban pajak. Hal ini menuntut otoritas pajak untuk terus memperbarui kebijakan serta juga prosedur auditnya untuk mendeteksi serta juga mencegah praktik-praktik tersebut. Otoritas pajak juga perlu memastikan bahwasanya aturan perpajakan terkait prinsip akrual dirumuskan dengan jelas serta juga diterapkan secara konsisten untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak (Chairani & Pulungan, 2024).

Dalam rangka meningkatkan transparansi serta juga akuntabilitas, beberapa negara telah mengadopsi standar akuntansi akrual secara penuh dalam pelaporan keuangan sektor publik, termasuk Indonesia yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual (SAP Akrual). Penerapan prinsip akrual dalam sektor publik ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan pemerintah, termasuk aset serta juga kewajibannya, serta untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik dengan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai pendapatan serta juga beban yang terjadi dalam suatu periode anggaran (Musdalifah et al., 2023).

Prinsip akrual dalam akuntansi serta juga pengelolaan pajak ialah elemen kunci yang memastikan bahwasanya laporan keuangan memberikan gambaran yang benar serta juga wajar mengenai kinerja keuangan suatu entitas. Meskipun penerapannya dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal estimasi serta juga perbedaan antara pelaporan keuangan serta juga perpajakan, prinsip ini tetap menjadi dasar bagi praktik akuntansi yang baik serta juga pengelolaan pajak yang efektif. Dengan memahami serta juga menerapkan prinsip akrual secara benar, baik perusahaan maupun otoritas pajak dapat memastikan bahwasanya laporan keuangan serta juga penghitungan pajak dilakukan secara transparan, akurat, serta juga sesuai dengan standar yang berlaku (Arodhiskara et al., 2023).

Dalam penerapan prinsip akrual pada akuntansi serta juga pengelolaan pajak di PT BPRS Karya Mugi Sentosa, muncul beberapa permasalahan yang menantang. Salah satu masalah utama ialah kompleksitas dalam mengakui pendapatan serta juga biaya pada saat terjadinya transaksi, terutama ketika pembayaran belum diterima atau dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan arus kas, karena pendapatan yang diakui belum tentu tercermin dalam kas yang tersedia. Selain itu, perbedaan interpretasi antara prinsip akrual dalam akuntansi serta juga ketentuan perpajakan yang lebih mengarah pada basis kas dapat menimbulkan kesenjangan dalam pelaporan pajak, di mana perusahaan mungkin harus membayar pajak atas pendapatan yang belum benar-benar diterima. Permasalahan lain yang tidak kalah penting ialah kurangnya pemahaman yang mendalam di antara staf keuangan mengenai aplikasi praktis prinsip akrual, yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan serta juga pelaporan yang berdampak negatif pada keuangan perusahaan serta juga kepatuhan pajak.

Tujuan utama dari temuan ini ialah untuk mengeksplorasi serta juga menganalisis penerapan prinsip akrual dalam akuntansi serta pengelolaan pajak di PT BPRS Karya Mugi Sentosa, dengan fokus pada identifikasi tantangan serta juga pengembangan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah yang muncul. Temuan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan praktik akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, guna memastikan bahwasanya perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara efisien tanpa mengorbankan likuiditas serta juga stabilitas keuangan.

Gap research yang diidentifikasi kurangnya studi yang menghubungkan secara langsung penerapan prinsip akrual dalam sektor perbankan syariah dengan implikasinya terhadap pengelolaan pajak. Meskipun telah banyak temuan mengenai penerapan prinsip akrual di sektor swasta secara umum, ada sedikit perhatian yang diberikan pada bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam lingkungan perbankan syariah, yang memiliki karakteristik unik, termasuk dalam hal pembagian hasil serta juga pengakuan pendapatan. Selain itu, sebagian besar temuan yang ada cenderung fokus pada aspek teknis akuntansi tanpa memperhitungkan dampak langsungnya terhadap kepatuhan pajak serta juga manajemen arus kas.

Urgensi temuan ini menjadi sangat tinggi mengingat bahwasanya PT BPRS Karya Mugi Sentosa beroperasi dalam sektor yang sangat diatur serta juga diawasi secara ketat oleh otoritas keuangan serta juga pajak. Kesalahan dalam penerapan prinsip akrual atau dalam pengelolaan kewajiban pajak dapat mengakibatkan sanksi yang signifikan, baik dalam bentuk denda maupun reputasi. Di tengah persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan syariah, keakuratan serta juga efisiensi dalam pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan menjadi penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabah serta juga pemangku

kepentingan lainnya. Oleh karena itu, temuan ini tidak hanya penting dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi keberlanjutan serta juga kesuksesan jangka panjang PT BPRS Karya Mugi Sentosa.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Akrua dalam Akuntansi

Prinsip akrual merupakan dasar akuntansi yang mengharuskan pengakuan pendapatan dan beban saat terjadinya, bukan saat arus kas masuk atau keluar. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan suatu entitas dalam periode akuntansi tertentu. Dalam konteks prinsip akrual, pendapatan diakui saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, dan bukan saat pembayaran diterima. Sebaliknya, beban diakui pada saat biaya tersebut terjadi, terlepas dari kapan pembayaran dilakukan. Hal ini memungkinkan laporan keuangan untuk mencerminkan aktivitas ekonomi yang telah terjadi selama periode tersebut, sehingga pengguna laporan keuangan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan relevan. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip kas, yang hanya mengakui transaksi ketika uang benar-benar berpindah tangan, dan seringkali tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan jangka panjang. Penerapan prinsip akrual juga melibatkan penggunaan akun-akun akrual dan penangguhan, seperti piutang yang belum diterima dan beban yang belum dibayar, yang membantu dalam mencocokkan pendapatan dan beban pada periode yang sama.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dan beban adalah aspek utama dalam akuntansi berbasis akrual. Pendapatan diakui pada saat terjadinya, yang biasanya terkait dengan transfer risiko dan manfaat dari penjual kepada pembeli. Ini berarti bahwa pendapatan harus diakui saat barang atau jasa telah diserahkan, meskipun pembayaran mungkin belum diterima. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memberikan layanan pada bulan Januari namun pembayaran diterima pada bulan Februari, pendapatan harus diakui pada bulan Januari untuk mencerminkan saat layanan tersebut benar-benar diserahkan. Sebaliknya, beban diakui ketika biaya terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengeluarkan biaya untuk bahan baku pada bulan Desember tetapi pembayaran dilakukan pada bulan Januari, beban bahan baku harus dicatat pada bulan Desember untuk mencocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang tersebut. Pengakuan yang tepat dari pendapatan dan beban memastikan bahwa laporan laba rugi mencerminkan hasil operasional yang sebenarnya dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Akrual dan Penangguhan

Akrual dan penangguhan merupakan konsep penting dalam akuntansi akrual yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan beban di luar arus kas. Akrual merujuk pada pengakuan pendapatan atau beban sebelum arus kas terjadi. Misalnya, bunga yang diperoleh dari investasi tetapi belum dibayar atau diterima harus dicatat sebagai pendapatan akrual, sementara beban yang terjadi tetapi belum dibayar, seperti utang gaji, harus dicatat sebagai beban akrual. Di sisi lain, penangguhan merujuk pada pendapatan atau beban yang diakui

setelah arus kas terjadi. Contoh penangguhan termasuk pendapatan sewa yang diterima di muka, yang dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan kemudian diakui sebagai pendapatan secara bertahap sesuai dengan periode sewa. Konsep-konsep ini penting untuk mencocokkan pendapatan dan beban pada periode yang relevan, yang membantu dalam penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemangku kepentingan.

Pengelolaan Pajak dan Prinsip Akrua

Pengelolaan pajak dalam kerangka prinsip akrual melibatkan pengakuan pajak berdasarkan laba akuntansi yang dihasilkan. Pajak penghasilan harus dihitung berdasarkan laba yang diakui dalam laporan keuangan sesuai prinsip akrual, bukan hanya pada saat pembayaran pajak dilakukan. Prinsip akrual mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak yang timbul dari pendapatan yang telah diakui, meskipun pembayaran pajak tersebut mungkin belum dilakukan. Selain itu, perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal seringkali memerlukan pencatatan kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan, yang merupakan konsekuensi dari perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak. Misalnya, penyusutan aset dapat diperlakukan berbeda dalam laporan keuangan dan laporan pajak, sehingga perusahaan perlu mencatat perbedaan ini untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dan aset pajak dicatat dengan benar. Pengelolaan pajak yang baik dengan mempertimbangkan prinsip akrual membantu perusahaan dalam perencanaan pajak yang lebih efektif dan meminimalkan risiko ketidakakuratan dalam laporan pajak serta potensi sengketa pajak di masa depan.

METODE PENELITIAN

Temuan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan prinsip akrual dalam akuntansi serta juga pengelolaan pajak di PT BPRS Karya Mugi Sentosa. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk kompleksitas yang terkait dengan praktik akuntansi serta juga perpajakan di perusahaan ini.

Desain Penelitian

Desain temuan yang digunakan ialah studi kasus tunggal, yang berfokus pada satu objek temuan ialah PT BPRS Karya Mugi Sentosa. Studi kasus ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip akrual dalam akuntansi serta juga dampaknya terhadap pengelolaan pajak perusahaan.

Sumber Data

Sumber data dalam temuan ini terdiri dari data primer serta juga sekunder:

1. Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci, termasuk manajer keuangan, staf akuntansi, serta juga auditor internal PT BPRS Karya Mugi Sentosa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pengalaman praktis mereka dalam menerapkan prinsip akrual serta juga tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak.
2. Data Sekunder: Data sekunder meliputi laporan keuangan perusahaan, dokumen perpajakan, kebijakan akuntansi, serta literatur yang relevan. Data ini dikumpulkan dari

arsip internal perusahaan, jurnal akademik, buku teks, serta juga regulasi pemerintah yang terkait dengan akuntansi serta juga perpajakan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara Semi-Terstruktur: Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai praktik akuntansi akrual serta juga pengelolaan pajak di PT BPRS Karya Mugi Sentosa.
2. Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pencatatan akuntansi serta juga pelaporan pajak di perusahaan. Observasi ini bertujuan untuk memahami alur kerja serta juga identifikasi potensi kesenjangan antara teori serta juga praktik.
3. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan serta juga menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan, SPT pajak, serta juga kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT BPRS Karya Mugi Sentosa.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan akan disederhanakan, dikategorikan, serta juga diringkas untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan temuan.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks untuk memudahkan interpretasi serta juga analisis lebih lanjut.
3. Penarikan Kesimpulan serta juga Verifikasi: Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul dari analisis data. Kesimpulan ini akan diverifikasi dengan mengecek keabsahan data serta juga konsistensi temuan melalui triangulasi sumber serta juga metode.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas serta juga reliabilitas hasil temuan, beberapa langkah dilakukan:

1. Triangulasi Sumber serta juga Metode: Peneliti menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) serta juga metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan serta juga konsistensi informasi.
2. Member Checking: Peneliti akan memberikan hasil wawancara serta juga interpretasi awal kepada para informan untuk memverifikasi kebenaran serta juga relevansi informasi yang diberikan.
3. Audit Trail: Seluruh proses pengumpulan, analisis, serta juga interpretasi data didokumentasikan secara rinci untuk memastikan transparansi serta juga dapat dilacak oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perencanaan Pajak pada PT BPRS Karya Mugi Sentosa

Perencanaan pajak di PT BPRS Karya Mugi Sentosa ialah aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Temuan ini mengungkap bahwasanya PT BPRS Karya Mugi Sentosa mengimplementasikan berbagai strategi perencanaan pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak di perusahaan ini ialah untuk meminimalkan kewajiban pajak sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Strategi yang diterapkan mencakup evaluasi rutin terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, serta pemanfaatan peluang penghematan pajak yang legal.

Berdasarkan data yang diperoleh, PT BPRS Karya Mugi Sentosa menggunakan metode perencanaan pajak yang melibatkan analisis mendalam terhadap struktur pendapatan serta juga pengeluaran perusahaan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pengeluaran yang dapat dikurangkan serta juga mengoptimalkan pemanfaatan insentif pajak yang ada. Perencanaan pajak yang efektif di perusahaan ini juga melibatkan perencanaan aliran kas untuk pajak, yang membantu perusahaan dalam menentukan waktu pembayaran pajak yang optimal serta juga mengurangi dampak pada arus kas perusahaan.

Tabel 1. Rencana Perencanaan Pajak PT BPRS Karya Mugi Sentosa

Kegiatan	Deskripsi	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
Evaluasi Peraturan Pajak	Temuan serta juga analisis peraturan perpajakan terbaru	Memastikan kepatuhan serta juga memanfaatkan peluang penghematan pajak	Tahunan
Pengelolaan Pengeluaran	Identifikasi pengeluaran yang dapat dikurangkan	Mengoptimalkan pengurangan pajak	Bulanan
Perencanaan Aliran Kas	Pengaturan waktu pembayaran pajak	Meminimalkan dampak pada arus kas	Bulanan

Hasil temuan menunjukkan bahwasanya PT BPRS Karya Mugi Sentosa memanfaatkan sistem informasi pajak yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan pajak. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses data perpajakan secara real-time serta juga membuat proyeksi pajak yang lebih akurat. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko pajak lebih awal serta juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut sebelum menjadi isu yang signifikan.

Evaluasi Proses Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak di PT BPRS Karya Mugi Sentosa ialah proses yang sangat terstruktur serta juga dilakukan secara rutin sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses pelaporan ini mencakup penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak baik tahunan maupun masa, yang dilakukan dengan tujuan untuk melaporkan perhitungan serta juga pembayaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Dalam evaluasi ini, ditemukan bahwasanya perusahaan mengelola pelaporan pajak dengan sangat hati-hati serta juga sistematis. PT BPRS Karya Mugi Sentosa menggunakan

perangkat lunak perpajakan untuk mengelola serta juga menyusun laporan SPT secara elektronik, yang mempermudah proses pelaporan serta juga memastikan akurasi data. Perangkat lunak ini juga membantu dalam memantau tenggat waktu pelaporan serta juga pembayaran pajak, mengurangi risiko keterlambatan serta juga denda.

Tabel 2. Proses Pelaporan Pajak PT BPRS Karya Mugi Sentosa

Jenis SPT	Frekuensi Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan	Cara Pelaporan	Status
SPT Tahunan PPh 21	Tahunan	31 Maret	Elektronik	Tepat Waktu
SPT Tahunan PPh 26	Tahunan	30 April	Elektronik	Tepat Waktu
SPT Masa PPh 21	Bulanan	20 bulan berikutnya	Elektronik	Tepat Waktu
SPT Masa PPh 23/26	Bulanan	20 bulan berikutnya	Elektronik	Tepat Waktu

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya PT BPRS Karya Mugi Sentosa melaporkan semua jenis SPT tepat waktu. Perusahaan juga memastikan bahwasanya seluruh dokumen pendukung untuk pelaporan disiapkan serta juga disimpan dengan baik, guna menghindari masalah dalam proses verifikasi serta juga audit oleh otoritas pajak.

Evaluasi proses pelaporan pajak menunjukkan bahwasanya perusahaan tidak hanya mematuhi batas waktu pelaporan tetapi juga memanfaatkan sistem e-Filing untuk meningkatkan efisiensi serta juga akurasi laporan. Ini ialah langkah penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang konsisten serta juga mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak.

Implementasi Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akrua Basis

Kebijakan akuntansi PT BPRS Karya Mugi Sentosa yang berdasarkan prinsip akrual basis memberikan dampak signifikan terhadap pelaporan keuangan serta juga perpajakan perusahaan. Prinsip akrual basis mengharuskan pengakuan pendapatan serta juga biaya pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat uang diterima atau dibayarkan. Ini berimplikasi pada pengakuan pendapatan dari pembiayaan sebelum pembayaran diterima, serta juga pengakuan biaya pada saat terjadinya kewajiban.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip akrual basis memungkinkan PT BPRS Karya Mugi Sentosa untuk mencatat pendapatan serta juga biaya secara lebih akurat serta juga tepat waktu. Hal ini membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta memudahkan dalam perencanaan serta juga pelaporan pajak.

Tabel 3. Penerapan Prinsip Akrua Basis pada PT BPRS Karya Mugi Sentosa

Kategori	Pengakuan Akuntansi	Contoh Transaksi	Dampak terhadap Laporan Pajak
Pendapatan	Dikenali saat transaksi terjadi	Pendapatan dari pembiayaan	Akurasi dalam laporan pendapatan
Biaya	Dikenali saat kewajiban terjadi	Biaya operasional yang belum dibayar	Pengeluaran tercatat pada periode yang tepat

Penerapan prinsip akrual basis di PT BPRS Karya Mugi Sentosa memungkinkan perusahaan untuk mengakui pendapatan serta juga biaya pada periode yang sesuai dengan terjadinya transaksi. Ini penting untuk memastikan bahwasanya laporan keuangan

mencerminkan situasi keuangan yang akurat serta juga meminimalkan perbedaan antara pendapatan serta juga biaya yang diakui secara akuntansi serta juga pajak.

Jenis Pajak yang Dipungut serta juga Disetor

PT BPRS Karya Mugi Sentosa memiliki kewajiban untuk memungut serta juga menyetor berbagai jenis pajak berdasarkan aktivitas operasionalnya. Jenis-jenis pajak yang dipungut meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23/26, Pajak Sewa, Pajak Badan, serta juga Pajak Tahunan (PPh 26). Setiap jenis pajak memiliki prosedur pemungutan serta juga penyetoran yang berbeda, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak yang dikenakan pada pendapatan pegawai (PPh 21) harus dipotong serta juga disetorkan secara berkala, sementara pajak atas penghasilan dari jasa (PPh 23) serta juga bunga (PPh 26) harus dilaporkan serta juga dibayar sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Pajak badan dikenakan atas keuntungan tahunan perusahaan serta juga harus dilaporkan serta dibayar paling lambat tanggal 30 April setiap tahun.

Tabel 4. Jenis Pajak serta juga Prosedur Pemungutan di PT BPRS Karya Mugi Sentosa

Jenis Pajak	Kewajiban	Frekuensi	Batas Waktu Pelaporan	Cara Pelaporan
PPh 21	Pemotongan dari pendapatan pegawai	Bulanan	20 bulan berikutnya	Elektronik
PPh 23	Pemotongan dari penghasilan jasa	Bulanan	20 bulan berikutnya	Elektronik
PPh 26	Pajak atas bunga dari tabungan	Tahunan	30 April	Elektronik
Pajak Badan	Pajak atas keuntungan tahunan	Tahunan	30 April	Elektronik
Pajak Sewa	Pajak atas pendapatan sewa	Bulanan	20 bulan berikutnya	Elektronik

Hasil analisis menunjukkan bahwasanya PT BPRS Karya Mugi Sentosa telah mengimplementasikan prosedur pemungutan serta juga penyetoran pajak dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Perusahaan menggunakan sistem elektronik untuk memastikan pelaporan yang tepat waktu serta juga akurat, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penghitungan serta juga pelaporan pajak.

Secara keseluruhan, hasil temuan menunjukkan bahwasanya PT BPRS Karya Mugi Sentosa memiliki sistem manajemen pajak yang terstruktur dengan baik, baik dalam hal perencanaan pajak, pelaporan pajak, implementasi kebijakan akuntansi, maupun pemungutan serta juga penyetoran pajak. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan pajak serta juga efisiensi dalam pengelolaan pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari temuan ini menunjukkan bahwasanya PT BPRS Karya Mugi Sentosa telah mengimplementasikan praktik perencanaan, pelaporan, serta juga pengelolaan pajak yang sangat terstruktur serta juga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan ini

secara efektif memanfaatkan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya melalui evaluasi reguler serta juga pemanfaatan peluang penghematan pajak yang sah. Proses pelaporan pajak dilakukan dengan cermat serta juga tepat waktu, menggunakan sistem elektronik yang mendukung akurasi serta juga efisiensi. Penerapan prinsip akrual basis dalam kebijakan akuntansi perusahaan memastikan bahwasanya pendapatan serta juga biaya diakui dengan tepat, mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya serta juga meminimalkan perbedaan dalam pelaporan pajak. Selain itu, kewajiban pemungutan serta juga penyetoran berbagai jenis pajak, termasuk PPh 21, PPh 23/26, pajak sewa, pajak badan, serta juga pajak tahunan, dikelola dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan yang berlaku, memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan pajak serta juga pengelolaan keuangan yang baik. Secara keseluruhan, PT BPRS Karya Mugi Sentosa menunjukkan standar tinggi dalam manajemen pajak yang mendukung efisiensi operasional serta juga keberlanjutan finansial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, P., Zuliyana, S., & Asrina, S. (2024). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 474–485.
- Amrih, G. G. (2023). Perkembangan Keuangan Berstandar Akuntansi Akrual. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(2), 1323–1336.
- Arizah, A., Ayudina, R., Muchran, M., & Aarsal, M. (2024). Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 455–469.
- Arodhiskara, Y., Lubis, I. T., Damis, S., Abdillah, M. A., Darmawan, D., Fiddin, F., Safarida, N., Damayanti, F., Purtanto, P., & Fauzi, A. (2023). *Akuntansi Keuangan Daerah: Pendekatan Berbasis Akrual*.
- Astuti, D. S. P., Nindyawan, B. P., & Aisyah, S. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Perpajakan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Chairani, T. S., & Pulungan, K. A. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual atas Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4123–4138.
- Hidayat, E., & Jaelani, J. (2024). Pengaruh Dari Dampak Manajemen Laba Rill Dan Akrual Serta Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Sebagai Moderasi. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1), 249–262.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2022). *Penghindaran Pajak: Manajemen Laba dan Transfer Pricing*. GUEPEDIA.
- Irawan, R., & Djaddang, S. (2020). Kualitas Laba Atas Intensitas Kecurangan Akuntansi Dan Manajemen Laba Akrual Terhadap Agresivitas Pajak. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 199–208.
- Musdalifah, H., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). DAMPAK DARI PENGGUNAAN BASIS AKRUAL, PAJAK TANGGUHAN, DAN BEBAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(3), 437–445.
- Permatasari, Y. D., Askandar, N. S., & Anwar, S. A. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban

Pajak Tangguhan, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 146–157.

Pratama, E. A. (2023). PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADADAP MANAJEMEN LABA (STUDI KASUS PT. AKR CORPORINDO TBK PERIODE 2012-2021). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI SAKTI (JIMES)*, 1(2), 144–150.

Simanjuntak, O. D. P. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan, Dan AkruaI Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 215–224.

Siswanto, S. (2020). Penerapan Akuntansi AkruaI Pendapatan PNPB Panas Bumi. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 197–212.

Widyani, K. (2023). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Yulianingsih, S., Holili, M. H., & Asti, P. (2023). Pengaruh Dari Dampak Manajemen Laba Rill Dan AkruaI Serta Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Sebagai Moderasi. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 270–286.